



Social Safety Net Pada Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Palembang

Muhammad Robby Kaharudin*, Heri Junaidi, Maftukhatusolikah

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kota Palembang dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif Teknik sampling dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dan snowball sampling, Dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data primer di peroleh dari Dinas sosial kota Palembang, Koordinator PKH Kota Palembang, Pendamping Kecamatan Ilir Barat Dua Palembang, serta Peserta PKH yang dipilih berdasarkan syarat-syarat tertentu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan PKH telah berjalan dengan efektif di Kota Palembang dan sesuai dengan tujuan program. PKH juga telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga miskin di Kota Palembang khususnya kecamatan Ilir Barat Dua Palembang, Namun kesejahteraan tersebut tidak diiringi pada tingkat kesadaran dalam menjalankan aktivitas ibadah (agama). Padahal dalam Ekonomi Islam untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga harus mempertimbangkan indikator Religion.

Kata Kunci: Social safety net, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Islam.

*Correspondence E-Mail : muhrobbykaharudin@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v7i2.2020.261-274

© 2020 UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Upaya pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu. Menurut Soegijoko Seperti dikutip dari *Frederic W. Nalle*, menyatakan bawah Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan (Frederic W. Nalle, Emilia K. Kiha: 2018).

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam tidak dapat dibenarkan seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam—sekalipun *Ahl alDzimme* (warga negara non-muslim)—menderita lapar, tidak berpakaian, menggelandang (tidak bertempat tinggal). Dengan kata lain ajaran Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha keras untuk membendungnya serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkannya (Yusuf al-Qardhawi: 2002).

Islam, sebagai agama *rahmatan lil'alam* mempunyai tanggungjawab besar untuk merespon masalah kemiskinan. Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki perhatian yang besar terhadap problem kemiskinan. Dalam konteks Negara Indonesia, Konstisusi negara juga menyatakan bahwa masyarakat miskin menjadi tanggung jawab negara, seperti yang termaktub secara eksplisit melalui

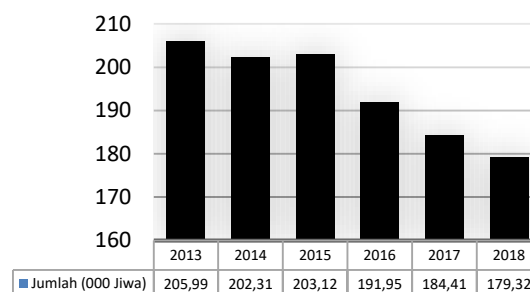
UUD 1945 pasal 34 yang berisi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 1998. Awalnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah akibat dampak krisis moneter. Pada masa itu pemerintah Indonesia membuat sebuah program jaring pengaman sosial atau dikenal dengan *Social Safety Net*. Menurut Sumodiningrat, kebijakan program *Social Safety Net* ini bertujuan sebagai upaya penyelamatan (*rescue*) dan pemulihan (*recovery*) Ekonomi yang melanda masyarakat di Indonesia (Sumodiningrat, gunawan : 1999). *Social Safety Net* diciptakan untuk menjaga agar masyarakat tidak jatuh ke bawah tingkat kehidupan minimum yang dianggap layak oleh masyarakat tersebut. Seiring berjalannya waktu pemerintah Indonesia memperluas kebijakan *Social Safety Net* dengan program perlindungan sosial bagi penduduk miskin di indonesia. Tahun 2007 pemerintah pusat masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan program penanggulangan kemiskinan yang bernama Program Keluarga Harapan (PKH) program ini merupakan duplikasi dari program pembrantasan kemiskinan yang dikenal didunia internasional yaitu *Conditional cash transfer* yang menggunakan sistim pendekatan *Income support schemes (ISS)* atau skema tunjangan pendapatan yang diberikan kepada rumah tangga miskin di Indonesia (Edi suharto: 2015). Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) diatur melalui Undang Undang

Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2018 Pemerintah pusat melalui Kementerian sosial Republik Indonesia menambah jumlah penerima Program keluarga harapan (PKH) sebanyak 10.000.232 rumah tangga miskin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,5 Triliun (Edi Suharto: 2015). Di Palembang tahun 2020 jumlah penerima bantuan Program keluarga harapan (PKH) sebanyak 51.938 Keluarga miskin yang tersebar sebanyak 18 kecamatan di seluruh kota Palembang (Daryono:2020). Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi beberapa kriteria program (Direktorat Jaminan sosial : 2013). Penggunaan dana bantuan PKH diharapkan pemerintah untuk digunakan dalam membeli kebutuhan dasar yang menunjang pendidikan, kesehatan dan perbaikan ekonomi keluarga. Namun pada kenyataannya berdasarkan temuan Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia, penerima bantuan PKH tersebut mayoritas adalah seorang perokok aktif. Sehingga, ditemukan beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) yang membelanjakan bantuan untuk membeli rokok. Dengan temuan ini, ada potensi dana PKH yang diambilkan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) justru mengalir untuk pembelian rokok. Padahal seharusnya dana bantuan PKH wajib dimanfaatkan dengan tepat agar sesuai dengan harapan Program. Seperti

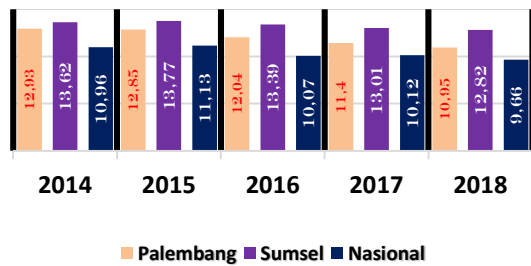
halnya pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko widodo yang menerangkan bahwa penggunaan dana PKH harus digunakan dengan tepat, Misalnya untuk beli kebutuhan primer seperti telur, ikan, buku sekolah, seragam anak, sepatu anak yang bisa menunjang pendidikan dan kesehatan keluarga. Program Keluarga Harapan memiliki dua fungsi yaitu untuk jangka pendek dengan membantu meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan jangka panjang, untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan (Pedoman Umum PKH : 2019). Seiring dengan berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palembang, ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan yang ada di kota Palembang. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan per bulan maret tahun 2018 jumlah penduduk miskin di kota Palembang masih mencapai 179,32 ribu orang (BPS: 2018).

Tabel 1. Jumlah Penduduk miskin Kota Palembang



Sumber: BPS 2018

Tabel 2. Persentase Kemiskinan kota Palembang, Sumsel dan Nasional



Sumber: BPS 2018

Pada skala nasional kota Palembang juga termasuk kota yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar, melampaui dari nilai rata-rata masyarakat miskin secara nasional sebesar 9,66%. Ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di kota Palembang merupakan persoalan besar yang perlu diselesaikan dengan cepat agar terciptanya kesejahteraan yang merata pada penduduk kota Palembang. Dari fenomena kemiskinan serta pernyataan diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam untuk melihat bagaimana efektifitas pelaksanaan PKH terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kota Palembang dalam perspektif Ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fenomena yang diselidiki dalam penelitian ini adalah fenomena peningkatan kesejahteraan keluarga miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti terlibat langsung dalam

penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan. Jadi, melalui penelitian deskriptif ini agar peneliti mampu mendiskripsikan penerapan *social safety net* pada Program Keluarga Harapan (PKH) di kota Palembang serta efektifitas pelaksanaan PKH terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kota Palembang dalam perspektif ekonomi islam.

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu; 1). Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, 2). Koordinator PKH Kota Palembang, 3). Pendamping PKH kecamatan Ilir barat Dua 4). Keluarga penerima manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu Keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Ilir Barat Dua Palembang yang telah menerima bantuan minimal selama delapan tahun atau sejak tahun 2011 lalu dipilih lagi yang memiliki komponen pendidikan dan kesehatan.

Lokasi penelitian ini di unit pelaksana Program keluarga Harapan kota Palembang. Fokus Informan yang dijadikan sampel adalah wilayah kecamatan Ilir Barat Dua karena wilayah ini mampu merepresentasikan dari hasil penelitian. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Teknik Pengolahan dan Analisa Data menggunakan model analisis interaktif miles dan huberman yaitu

penggumpulan data, reduksi data, penyajian data dan tahap terakhir penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Program PKH

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan hal penting yang menentukan berhasil atau tidaknya program. Program dapat dikatakan efektif, apabila sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan aturan yang telah disepakati. Sasaran yang tepat, baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan suatu keberhasilan (Makmur: 2011). Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan serta terdaftar dalam basis data terpadu (BTD) atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) program penanganan fakir miskin. Selanjutnya memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Menurut hasil wawancara ke kepala jaminan sosial dan keluarga dinas sosial kota Palembang, data yang diambil dalam menentukan sasaran program keluarga harapan (PKH) bersumber dari BDT (Basis data terpadu) yang merupakan data miskin yang diperoleh dari hasil sensus penduduk. Lalu penerima PKH memiliki tiga komponen yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

1. Kriteria Komponen Kesehatan

Sasaran kriteria kesehatan Program Keluarga Harapan (PKH) di kota Palembang dalam komponen kesehatan sudah sesuai kriteria sasaran yang telah ditetapkan. Kriteria komponen kesehatan di Kota Palembang

telah mencakup keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) yang memiliki komponen ibu hamil atau menyusui atau anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Ketepatan sasaran kriteria komponen kesehatan di Kota Palembang, dapat terjadi karena adanya beberapa cara yang dilakukan pendamping PKH yaitu melakukan verifikasi antara Basis Data Terpadu (BDT) dengan keluarga penerima manfaat komponen kesehatan di Kota Palembang, yang dilakukan melalui verifikasi rutin maupun *home visit* oleh pendamping PKH setiap tiga bulan kepada para KPM di Kota Palembang dan terjalinnya koordinasi baik dengan pihak berwenang mulai dari kelurahan, RW hingga RT setempat guna memudahkan proses evaluasi.

2. Kriteria Komponen Pendidikan

Dalam sasaran kriteria komponen pendidikan di Kota Palembang telah sesuai sasaran, yaitu mencakup warga miskin dan rentan miskin yang memiliki anak SD, SMP dan SMA yang telah terdaftar dalam BDT. Proses pengawasan dalam memastikan kriteria pendidikan ini dilakukan dengan cara mengkonfirmasi langsung ke sekolah siswa penerima PKH yang bersangkutan. Dalam melakukan pemutakhiran data pendamping PKH setiap tiga bulan melakukan kunjungan ke sekolah untuk melakukan proses control terhadap kehadiran siswa.

3. Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial

Sasaran kriteria komponen kesejahteraan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palembang, dalam komponen lanjut usia belum

mencakup semua lansia sesuai sasaran, sedangkan pada penyandang disabilitas berat telah sesuai sasaran yaitu telah mengcover semua penyandang disabilitas berat dari keluarga miskin dan rentan miskin. Penyebab belum tercakup semua lansia sesuai kriteria dalam komponen kesejahteraan sosial ialah belum terdaftarnya lansia dalam Basis Data Terpadu dan tidak lagi sesuai sasaran. Proses pendaftaran BDT yang agak sulit dilakukan menjadi faktor pemnghambat tercakupnya semua lansia di PKH.

Ketepatan Tujuan

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

Peningkatan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial merupakan tujuan yang sangat penting dari Program PKH. Oleh karenanya setiap peserta PKH diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya di fasilitas pendidikan (komponen pendidikan) serta wajib menghadiri fasilitas kesehatan (komponen kesehatan) untuk menjaga kesehatan keluarga. Dalam aturannya peserta diwajibkan memenuhi komitmen kehadiran di fasilitas kesehatan minimal satukali setiap bulannya, untuk komponen pendidikan wajib hadir disekolah minimal 85% kehadiran setiap bulannya baik SD/SMP/SMA. Untuk Lansia dan disabilitas diwajibkan ikut serta dalam *Homecare* dan *Homevisit*. Jika peserta PKH tidak komitmen menjalankan

kewajibannya maka akan dikenakan sanksi penangguhan bantuan. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar peserta PKH benar-benar memerhatikan pendidikan bagi keluarganya. Peningkatan kualitas pendidikan akan berdampak terhadap terputusnya mata rantai kemiskinan pada keluarga tersebut. Pendidikanlah yang akan membawa keluarga miskin keluar dari kemiskinan. Sementara perhatian terhadap kesehatan akan berdampak pada peningkatan gizi keluarga yang berpengaruh pada kekuatan tubuh. Berikut adalah distribusi jawaban informan berdasarkan dampak penggunaan dana PKH terhadap pendidikan anak.

Tabel 3. Distribusi jawaban informan berdasarkan dampak bantuan PKH terhadap pendidikan anak

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Berpengaruh	18	60%
Berpengaruh	12	40%
Kurang Berpengaruh	0	0%
Tidak Berpengaruh	0	0%
Total	30	100%

Sumber: Hasil Wawacnara informan, data diolah 2020

Tabel 3 menerangkan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap pendidikan anak para peserta PKH. Dari 30 informan mayoritas menyatakan bahwa PKH ini memberikan dampak terhadap pendidikan anaknya sebanyak 18 Informan dengan persentase (60%) dan 12 informan dengan (40%) menyatakan berpengaruh.

Tabel 4. Distribusi jawaban informan berdasarkan dampak bantuan PKH dalam memenuhi kebutuhan makan keluarga

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Berpengaruh	15	50%
Berpengaruh	14	47%
Kurang Berpengaruh	1	3%
Tidak Berpengaruh	0	0%
Total	30	100%

Sumber: Hasil Wawancara informan, data diolah 2020

Dari table 4 juga menerangkan bahwa PKH memberikan dampak dalam memenuhi kebutuhan makan keluarga, Sebanyak 15 informan dengan persentase (50%) menyatakan sangat berpengaruh, 14 Informan (47%) menyatakan berpengaruh dan 1 Informan (3%) menyatakan kurang berpengaruh.

- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

Program keluarga harapan (PKH) dinilai telah membantu keluarga miskin peserta PKH dalam mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga. Program PKH memiliki skema bantuan tujangan pendapatan. Setiap peserta PKH menerima bantuan berupa uang tunai dengan jumlah masing-masing keluarga memiliki nominal yang berbeda berdasarkan komponen keluarga tersebut. Untuk komponen Ibu hamil, Anak usia dini, Lansia dan disabilitas

menerima Rp 2.400.000/tahun, Untuk keluarga yang memiliki anak SD 900.000/ tahun, anak SMP 1.500.000/tahun, anak SMA 2.000.000/tahun. Bantuan akan diberikan maksimal empat komponen dalam satu keluarga. Berdasarkan pernyataan informan bantuan tunai tersebut sangat dirasakan oleh peserta PKH dalam meringankan baban keluarga peserta PKH.

- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

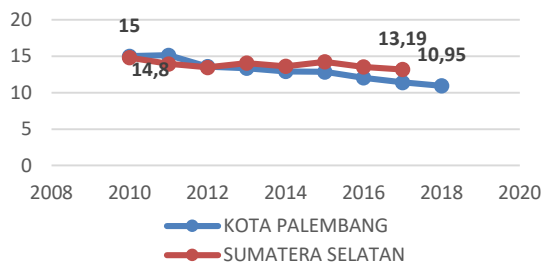
Perubahan perilaku peserta PKH juga merupakan tujuan dari program keluarga harapan. Perubahan perilaku kearah positif ini bertujuan untuk memberikan dampak terhadap kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial peserta PKH. Dalam membina peserta PKH agar mengalami perubahan prilaku sehari-harinya peserta PKH diwajibkan untuk mengikuti kegiatan rutin bulanan yang dampingi langsung oleh pendamping PKH. Tenaga Pendamping sosial PKH di kota Palembang jumlahnya sebanyak 240 orang dan tersebar di 18 kecamatan se-kota Palembang. Pertemuan tersebut dilakukan secara kolektif dengan dibentuk kelompok. Pertemuan ini disebut dengan P2K2 (Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga). Tujuannya untuk melakukan pembinaan, mengubah mindset sekaligus memberikan materi sesuai dengan modul yang telah diatur dalam pedoman PKH. Modul yang menjadi

bahasan dari pertemuan tersebut berupa modul pendidikan, pengasuhan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pertemuan P2K2 adalah ruh dari program ini. Karena inilah yang membedakan PKH dengan program jaring pengaman sosial lainnya. Perubahan mindset keluarga miskin akan memberikan dorongan terhadap peserta PKH untuk meningkatkan kemampuan keluarganya agar bisa keluar dari keluarga miskin. Untuk memastikan adanya perubahan perilaku peserta PKH dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan pendamping PKH kota Palembang melakukan verifikasi komitmen kehadiran di fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan peserta PKH.

4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

Turunan angka kemiskinan dan kesenjangan merupakan tujuan pokok program PKH. Dalam pelaksanaannya di kota Palembang selama kurun waktu lima tahun terakhir. Data BPS Kota Palembang menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan di kota Palembang sejak tahun 2013-2018, tetapi penurunan angka kemiskinan tersebut cenderung bergerak lambat.

Tabel 5. Statistik Kemiskinan



Program keluarga harapan telah membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di kota

Palembang, dari statistik kemiskinan BPS. Namun penurunan tersebut cenderung lambat. Ini terjadi karena beberapa pelaksanaan program PKH yang dinilai masih kurang maksimal. Salah satu contohnya saja ada beberapa data yang terdata di BDT yang kurang tepat sasaran dan upaya perbaikan itu sudah mulai Dinas Sosial kota Palembang lakukan dengan melakukan pemutakhiran data BDT di tahun 2019 lalu.

5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

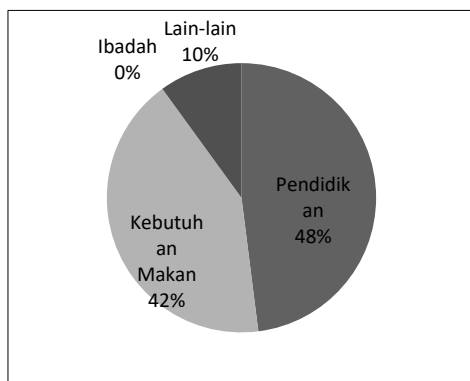
Salah satu tujuan PKH adalah untuk mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Salah satu jasa keuangan yang dimaksud ada pihak perbankan. Dalam pengenalan lembaga keuangan tersebut PKH menginisiasi penyaluran bantuan melalui Rekening dan ATM yang dimiliki setiap peserta PKH. Teknis penyaluran ini merupakan upaya pemerintah melakukan transparansi terhadap penyaluran bantuan sosial. Setiap peserta PKH akan diberikan buku tabungan dan ATM dari penyelenggara program. Di Palembang menggunakan Bank BRI sebagai lembaga penyalur bantuan dana PKH. Setiap jadwal pencairan, peserta PKH bisa secara langsung menarik saldo bantuannya di ATM terdekat.

Ketepatan Biaya

Ketepatan biaya merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas program. Makmur menjelaskan ketepatan biaya berkaitan dengan

ketepatan pemanfaatan biaya dan tidak mengalami kekurangan juga tidak mengalami kelebihan jumlah pembiayaan sampai kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik (Makmur:2011). Dari hasil wawancara ke informan mengenai jawaban terhadap penggunaan dana bantuan PKH dengan jumlah informan sebanyak tiga puluh peserta PKH ditemukan jawaban yang berpariatif. Mayoritas keluarga miskin peserta PKH dalam pengakuannya menggunakan dana PKH untuk keperluan pendidikan anak, diantaranya juga menggunakannya untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari seperti beras dan lauk pauk, sebagian kecil lagi menggunakannya untuk kebutuhan biaya listrik dan air, ada juga yang menggunakannya untuk modal usaha. Berikut rangkuman penggunaan dana PKH dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Informan:

Tabel 6. Persentase penggunaan dana PKH berdasarkan kebutuhan



Sumber: Hasil Persentase Wawancara, data diolah 2020

Dari tabel diatas menerangkan bahwa penggunaan dana PKH menurut hasil wawancara ke tigapuluh informan menyatakan bahwa 42% penggunaan bantuan PKH digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak,

48% untuk digunakan untuk menunjang kebutuhan makan keluarga dan 10% digunakan untuk biaya lain-lain seperti bayar kontrakan, bayar tagihan listrik/air serta untuk modal usaha. Penggunaan terbesar digunakan peserta PKH untuk menunjang biaya pendidikan anak dan kebutuhan makan keluarga. Penggunaan ini otomatis akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga. Jika dikaji pada aturan penggunaan dana PKH, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana PKH tersebut berarti telah digunakan dengan tepat sesuai aturan yang telah disosialisasikan.

Ketepatan Berpikir

Di dalam ketepatan berpikir, Dinas Sosial Kota Palembang telah memfasilitasi keberlangsungan UPPKH dan mengontrol bantuan yang diterima KPM, Selain itu Dinas Sosial Kota Palembang juga menjalankan tugasnya dengan melakukan pembinaan dan pertemuan rutin bersama seluruh Pendamping PKH Kota Palembang setiap bulannya. Melalui pertemuan tersebut Dinas Sosial kota Palembang bisa secara langsung menyampaikan setiap arahan dan kebijakan yang bisa disinergikan ke pendamping PKH Kota Palembang. Selain Dinas Sosial Kota Palembang, hal serupa juga dilakukan oleh Pendamping PKH Kota Palembang yang telah melakukan kunjungan rutin untuk memantau peserta PKH setiap bulannya. Pendamping Program Keluarga Harapan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana terdapat kerja sama antar tenaga kerja tersebut. Ketua Kelompok PKH di Kecamatan Ilir Barat Dua telah

menjalankan tugasnya dengan baik serta tercipta kerja sama yang dengan baik dengan pendamping PKH. Sejalan dengan itu, telah terjalin kerja sama antara Dinas Sosial Kota Palembang dan Pendamping PKH Kecamatan Ilir barat dua dan pendamping PKH Kecamatan Ilir barat dua dengan ketua kelompok PKH Kecamatan Ilir Barat Dua. Setiap bulannya pendamping PKH diwajibkan mengikuti rapat bulanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial kota Palembang.

Analisis Kesejahteraan Dalam ekonomi Islam

Teori Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam tentu berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam indikator kesejahteraan tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan hidup didunia saja, namun juga diakhirat. Seperti yang disampaikan pada bab sebelumnya Menurut Ikhwan Abidin Basri, Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami (Ikhwan abiding basri: 2005) . Menurut Amirus Sodiq dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4 ada tiga, yaitu :

- a). Menyembah Tuhan (Pemilik) Ka'bah
Indikator sejahtera yang pertama dan paling utama di dalam Al-Qur'an

adalah "Menyembah tuhan (pemilik) rumah (Ka'bah)", mengandung makna bahwa proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahului dengan pembangunan Tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang khalik. Semua aktivitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktivitas ibadah (Muhammad Sobary:2007). Dari hasil wawancara ke informan ditemukan bahwa mayoritas informan peserta PKH ternyata jarang menjalankan kegiatan ibadah wajib seperti shalat 5 waktu dengan rutin. Berikut persentase hasil wawancara ke informan.

Tabel 7. Distribusi jawaban informan mengenai aktivitas ibadah Shalat 5 waktu dalam sehari

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rutin	7	23%
Jarang	15	50%
Tidak Pernah	8	27%
Total	30	100%

Sumber: Hasil Wawancara informan, data diolah 2020

Tabel 7. menerangkan bahwa dari ke tigapuluh informan yang diwawancarai ada 15 orang (50%) informan menjawab bahwa jarang melaksanakan ibadah shalat lima waktu dalam sehari, 8 informan (27%) mengakui tidak pernah sama sekali melaksanakan ibadah shalat lima waktu serta 7 informan (23%) mengakui dirinya rutin melaksanakan ibadah shalat lima waktu.

Tabel 8. Distribusi jawaban informan mengenai aktivitas pengajian dalam satu bulan

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rutin	4	13%
Jarang	6	20%
Tidak Pernah	20	67%
Total	30	100%

Sumber: Hasil Wawancara informan, data diolah 2020

Tabel 10. menerangkan bahwa 20 informan (67%) mengakui tidak pernah mengikuti aktivitas pengajian setiap bulannya, 6 informan (20%) menjawab jarang dan 4 informan (13%) mengakui dirinya rutin mengikuti kegiatan pengajian atau keagamaan setiap bulannya. Lemahnya tingkat kesadaran dalam beragama ini kedepan akan berpotensi menjadi masalah baru bagi keluarga miskin penerima PKH di kota Palembang. Karena tidak memiliki pembinaan dalam memenuhi kebutuhan rohani yang memberikan rasa tenang bagi keluarga peserta PKH tersebut. Padahal Menurut pandangan ekonomi islam, kesejahteraan tidak hanya diukur pada sisi finansial semata yang berorientasi hanya pada urusan dunia tetapi juga harus memiliki orientasi pada akhirat.

b). Menghilangkan lapar

Kedua adalah hilangnya rasa lapar, jika hal itu bisa dipenuhi maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya (Athiyah, Muhyi al-Din: 1992). Dalam memenuhi kebutuhan makan (untuk menghilangkan rasa lapar) peserta PKH telah diberikan jaminan bantuan kebutuhan pokok

berupa sembako (beras, telur, sayur, dll) oleh pemerintah setiap bulannya melalui program BPNT. Bantuan sembako tersebut diberikan dengan nominal Rp. 200.000,-/bulan berupa saldo e-wallet di kartu ATM PKH yang dimilikinya. Setiap bulan peserta PKH tersebut menukarnya dengan sembako di E-Warung yang dibentuk oleh kementerian sosial. Bantuan tersebut telah memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok bergizi bagi peserta PKH. Ini dibuktikan dari hasil kesimpulan wawancara yang dilakukan, semua informan menyatakan setiap hari mengkonsumsi nasi dan mengkonsumsi lauk-pauk yang mengandung gizi.

c. Menghilangkan rasa takut.

Membuat suasana menjadi aman, nyaman dan tenang bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Jika perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus kriminalitas tinggi, maka mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan membuat sistem yang menjaga kesholehan setiap orang bisa terjaga merupakan bagian integral dari proses mensejahterakan masyarakat (M. Hamdar Arraiyyah:2007).

Selain terjaminnya tingkat keamanan keluarga dari kriminalitas indikator ini juga termasuk terjaminnya fasilitas pendidikan dan akses kesehatan; Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa mayoritas peserta PKH telah merasa aman tinggal dilingkungannya. Begitu juga dalam memenuhi fasilitas pendidikan dan

kesehatan. Peserta PKH merasakan tidak begitu sulit dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan di lingkungan tempat tinggalnya. Karena kecamatan Ilir Barat Dua termasuk wilayah yang memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang cukup memadai. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan juga semua peserta PKH juga menerima bantuan subsidi pendidikan dan kesehatan dari pemerintah. Subsidi pendidikan tersebut berupa Kartu Indonesia Pintar dan Subsidi Kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat yang bisa digunakan untuk berobat. Pada analisa diatas ditemukan bahwa dalam penelitian ini ada dua indikator yang sudah terpenuhi oleh peserta PKH di Kecamatan Ilir barat dua Palembang yaitu indikator 1).Terhilangnya dari rasa lapar; dan 2). Terjaminnya rasa aman nyaman serta terjaminnya fasilitas pendidikan dan kesehatan peserta PKH. Namun Ada satu indikator yang tidak terpenuhi oleh peserta PKH yaitu Indikator agama (*religion*). Ini dikarenakan PKH kota Palembang tidak menggunakan Teori kesejahteraan islam dalam mengukur tingkat kesejahteraan keluarga miskin di kota Palembang. PKH kota Palembang menggunakan indikator kesejahteraan berdasarkan BPS. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kesejahteraan terdiri dari 8 (delapan) indikator; 1). Pendapatan, 2). Pengeluaran, 3). Tempat tinggal, 4). Fasilitas tempat tinggal 5). Kesehatan keluarga 6). Kemudahan dalam akses fasilitas kesehatan 7). Kemudahan akses pendidikan dan 8). Kemudahan dalam mendapatkan transportasi. Menurut Kepala sie jaminan sosial dan keluarga

dinas sosial kota Palembang, Keluarga sejahtera adalah keluarga yang mandiri dan tidak memiliki ketergantungan bantuan sosial dengan pemerintah, Di Dinas sosial mengukurnya menggunakan indikator BPS, ada 14 indikator penilaian yang digunakan dalam mengukur tingkat kesmiskinan keluarga.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program PKH dinilai telah berjalan efektif sesuai dengan tujuan program. Penggunaan dana Program keluarga harapan (PKH) oleh peserta PKH juga telah sesuai digunakan berdasarkan aturan penggunaannya. Mayoritas informan menggunakan dana bantuan tersebut untuk memnuhi kebutuhan biaya pendidikan seperti membeli sepatu sekolah, buku, pakaian sekolah, iuran pendidikan dll. Sebagian besar lagi juga menggunakannya untuk membeli kebutuhan makanan bergizi yang menunjang kesehatan keluarga, seperti membeli beras, susu anak dan lauk-pauk yang mengandung gizi. PKH juga memiliki dampak terhadap pendidikan dan kesehatan keluarga peserta PKH. Namun pada analisa terhadap kesejahteraan dalam Ekonomi Islam ada dua indikator yang sudah terpenuhi oleh peserta PKH di Kecamatan Ilir barat dua Palembang yaitu indikator 1). Terhilangnya dari rasa lapar; dan 2). Terjaminnya rasa aman nyaman serta terjaminnya fasilitas pendidikan dan kesehatan peserta PKH. Mayoritas informan mengakui telah terpenuhi dalam memenuhi kebutuhan makan yang bergizi, mayoritas informan juga

merasa memiliki jaminan dalam menempuh pendidikan dan kesehatan bagi keluarganya. Namun Ada satu indikator yang tidak terpenuhi oleh peserta PKH yaitu Indikator agama (*religion*). Mayoritas informan masih banyak yang jarang melaksanakan ibadah wajib seperti shalat 5 waktu dan kegiatan pengajian. Rendahnya tingkat kesadaran dalam menjalankan aktivitas ibadah ini, kedepan akan berpotensi menambah masalah baru bagi keluarga miskin di kota Palembang. Rendahnya indikator agama tersebut juga dikarenakan PKH kota Palembang tidak menggunakan Teori kesejahteraan islam dalam mengukur tingkat kesejahteraan keluarga miskin di kota Palembang. PKH kota Palembang menggunakan indikator kesejahteraan berdasarkan BPS. Indikator yang dijadikan alat ukur oleh PKH kota Palembang hanya sebatas pemenuhan kebutuhan yang berorientasi pada kelangsungan hidup didunia. Padahal jika merujuk pada teori kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam ada indikator penting yang perlu dijadikan ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga, yaitu indikator *Religion* atau kesadaran beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi, (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*: Pustaka setia
- Al-Syatibi, Hamka Haq: (2007), *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab AlMuwafaqat*, Jakarta: Erlangga
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan (2018), Kependudukan & Social, Sumatera selatan : Pelaporan BPS
- Deddy Mulyadi, (2015), *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, (2013), *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan: Ed. Revisi*, Kementerian Sosial : Pedum PKH
- Edi Suharto, (2015), *Jurnal Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia : Studi kasus Program keluarga harapan*, Universitas pasundan bandung : Jurnal
- Frederic W. Nalle, Emilia K. Kiha, (2018), *Jurnal Dinamika ekonomi pembangunan*,UNDIP : Jurnal Ekonomi Pembangunan
- Ikhwan Abidin Basri, (2005), *Islam dan Pembngunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press
- Kementrian Agama Republik Indonesia, (2019), *Alquran dan Terjemahnya*
- M. B. Hendrie Anto. (2003), *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonesia
- Makmur, (2011), *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung : Refika Aditam
- Pasolong, Harbani, (2014), *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta

- Poerwadarminta W.J.S, (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- P3EI UII, *Ekonomi Islam*. (2008), Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Yusuf al-Qardhawi. (2002), *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Sumodiningrat, gunawan. (1999), *pemberdayaan masyarakat dan JPS*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Subbarao, K. et. All, (1997), *Safety net program's and poverty Reduction : Lessons from Cross- Country Experience*, Washinton DC : *The World Bank*
- Syaikh Muhammad Abduh, (1999), *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (Juz'Amma)*, diterj. oleh Muhammad Bagir, *Tafsir Juz 'Amma Muhammad Abduh*, Cetakan V; Bandung: Penerbit Mizan
- Tim Nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K), "Program keluarga harapan". <http://www.tnp2k.go.id> diakses pada 15 November 2019
- Ulum. Ihyaul MD. (2004), *Akuntansi Sektor Publik*, Malang ; UMM Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009
- Warkum Sumito. (2010), *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait. Cet keempat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Yusuf al-Qardhawi. (2002), *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan* Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Website Kementerian sosial. (2019), *Program keluarga harapan* <https://kemsos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>
- https://kominfo.go.id/content/detail/15884/presiden-pantau-langsung-penyaluran-pkh-tahap-pertama-tahun-2019/0/artikel_gpr diakses pada 15 November 2019
- <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405899/pendidikan/EKORA++JPS.pdf> diakses pada 15 November 2019
- https://pkh.kemsos.go.id/?pg=detail_berita&id=118 diakses pada 15 November 2019
- <http://ejournal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 15 November 2019